

CRITICAL EXPLORATION: THE INFLUENCE OF POSITIVISM THEORY AND CRITICAL THEORY IN THE FORMATION OF PUBLIC POLICY THROUGH A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Eksplorasi Kritis : Pengaruh Teori Positivisme Dan Teori Kritis Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Melalui *Systematic Literature Review*

Fariham Masula ^{1a(*)} Nurul Qurrotul Aini ^{2b}, Agung Winarno ^{3c}

¹²³Magister Manajemen, FEB, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

^afariham.masula.2304138@students.um.ac.id

^bnurul.qurrotul.2404138@students.um.ac.id

^cagung.winarno.fe@um.ac.id

(*) fariham.masula.2304138@students.um.ac.id

081225560376

How to Cite: Fariham Masula. (2025). Eksplorasi Kritis : Pengaruh Teori Positivisme dan Teori kritis Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Melalui *Systematic Literature Review*. doi: 10.36526/js.v3i2.5320

Received : 06-05-2025

Revised : 07-05-2025

Accepted: 23-05-2025

Keywords:

Critical Theory,
Decision Making,
Positivism Theory,
Public Policy

Abstract

This study aims to analyze the influence of positivism and critical theory in the formation of public policy through the Systematic Literature Review (SLR) method. By reviewing relevant literature, this research explores how positivist and critical theory approaches can impact the decision-making process in public policy. The results of this SLR indicate that positivism provides an objective and measurable framework, while critical theory emphasizes normative and transformational aspects. This study concludes that the combination of these two approaches can produce more holistic and responsive public policies to the needs of society. These findings are expected to provide guidance for policymakers in adopting a more balanced and effective approach in shaping equitable and sustainable public policies..

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan kemudahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Namun dalam prosesnya, berbagai isu keberpihakan muncul dan memberikan tantangan baru. Kemudahan yang dihasilkan dari perkembangan ini tidak selalu diterima secara positif oleh semua pihak, karena setiap perubahan sering kali diiringi oleh sudut pandang yang bersifat pro dan kontra (Vergeles, 2020). Oleh karena itu, pengembangan pemikiran yang objektif dan kokoh terhadap perubahan menjadi sangat penting

Pemikiran yang objektif terhadap ilmu pengetahuan memungkinkan sikap netral terhadap perubahan dan munculnya ilmu baru. Dalam proses pengkajian inovasi, sudut pandang yang berbeda menjadi pendorong munculnya pemikiran baru (Vergeles, 2020). Sudut pandang yang beragam akan memberikan perspektif yang lebih lengkap dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu yang lebih komprehensif. Perbedaan pandangan ini dalam jangka panjang akan memberikan manfaat pada proses perubahan di setiap keilmuan.

Dalam kerangka pemikiran kritis, dua teori utama yang sering digunakan adalah teori positivisme dan teori kritis. Paradigma dalam ilmu pengetahuan merupakan asumsi dasar yang diyakini oleh ilmuan dan menentukan arah pemikiran serta penelaahan fenomena yang dikaji (Irwan et al., 2021). Paradigma ini sangat mempengaruhi asumsi yang dibuat oleh peneliti.

Teori positivisme memberikan pandangan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada metode ilmiah dan empiris (Solehudin et al., 2021). Pendekatan ini menekankan pengukuran dan

data objektif sebagai dasar pengetahuan (Mayadah, 2022). Sebaliknya, teori kritis menekankan fokus pada analisis sosial dan dampak kekuasaan serta ideologi terhadap sebuah pengetahuan. Teori kritis menitikberatkan pada respon sosial dan implikasi nyata dari pengetahuan dalam kehidupan masyarakat (Sholahudin, 2020).

Kebijakan pemerintah sering kali dievaluasi dan diukur menggunakan dua teori tersebut. Melalui perspektif positivisme kebijakan diukur berdasarkan data empiris dan hasil yang dapat diobservasi dengan tujuan untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan efisien. Data statistik, survei dan uji coba lapangan digunakan untuk memberikan dasar yang kuat dan objektif bagi pembuat kebijakan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sementara itu, melalui perspektif teori kritis, kebijakan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap struktur sosial dan hubungan kekuasaan (Sholahudin, 2020). Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan sosial, representasi, dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kebijakan serta potensi ketidakadilan yang mungkin muncul. Dengan menggunakan kedua teori ini, evaluasi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mencakup aspek empiris dan kontekstual yang saling melengkapi.

Dalam sudut pandang ilmu pengetahuan, kedua teori ini memberikan konstruk pemikiran yang saling bertolak belakang, namun keduanya menjadi komplementer untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik terhadap fenomena yang kompleks (Muslim et al., 2022). Positivisme membantu dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur secara statistik sedangkan teori kritis memberikan ruang untuk eksplorasi konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintah menuju kesejahteraan sosial. Di sisi lain, dengan teori kritis, analisis kebijakan menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan dinamika sosial yang lebih luas dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda (Rizkwanti & Caspari, 2024).

Melalui tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedua teori untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik di Indonesia memperhatikan partisipasi masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (RLS) untuk mengkaji literatur yang relevan mengenai manfaat dari implementasi teori positivisme dan teori kritis dalam pembentukan kebijakan publik. SLR merupakan sebuah metode yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, menilai, dan menyintesis literatur yang ada terkait topik penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penjaringan literatur adalah dengan menentukan ruang lingkup pembahasan, menentukan kata kunci, dan menyaring artikel yang sesuai.

Kriteria artikel yang digunakan adalah artikel yang memiliki kata kunci positivisme, teori kritis, kebijakan publik, pembentukan kebijakan, dan pengaruh positivisme dan kritis. Artikel tersebut disaring dengan kemutakhiran 10 tahun terakhir mendapatkan 17 artikel yang relevan. Seluruh artikel tersebut kemudian dilakukan revidu secara keseluruhan untuk memahami substansi dan diolah menjadi sebuah kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil penjaringan literatur yang dilakukan, didapatkan hasil yang dipaparkan pada tabel 1
 Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur

No	Penulis	Judul	Hasil
1	(Rizkwanti & Caspari, 2024)	Pendekatan Studi Kritis dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik	Kebijakan publik seringkali mengalienasi masyarakat sebagai objek, perlu revisi untuk demokrasi dan emansipasi.

2	(Muslim et al., 2022)	Filsafat Positivisme dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Etika Administrasi Publik	Positivisme mendorong metodologi empiris untuk memperbaiki etika dan pengambilan keputusan administrasi publik.
3	(Swinkels, 2020)	How Ideas Matter in Public Policy: a Review of Concepts, Mechanisms, and Methods	Menunjukkan berbagai pendekatan ide dalam kebijakan publik (heuristik, alat strategis, kerangka institusional).
4	(Melati & Asmorowati, 2023)	Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Prespektif Kebijakan Publik	Implementasi BPNT dinilai meningkatkan inklusi sosial di masyarakat, meski ada aspek pendataan yang perlu diperbaiki
5	(Muadi et al., 2016)	Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik	Konsep kebijakan publik mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan
6	(Abdulah et al., 2022)	Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijakan	Identifikasi berbagai tahapan dalam siklus kebijakan publik
7	(Mariana, 2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan	Partisipasi masyarakat diharapkan mampu memperkaya proses pembuatan kebijakan. Partisipasi seharusnya dilakukan dalam bentuk dialog dan pengawalan
8	(Siregar, 2021)	Teori Kritis Habermas dan Kebijakan Merdeka Belajar	Teori kritis dapat menjadi landasan dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi secara berkelanjutan
9	(Rahail et al., 2024)	Proses Perumusan Kebijakan Publik di DPRD Kabupaten Mappi	Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan perumahan masih terbatas pada kontribusi material
10	(Kristian, 2023)	Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia	Tantangan implementasi seperti pengaruh internasional dan duplikasi instansi menyebabkan kebijakan tidak efektif
11	(Warman et al., 2023)	Konsep Umum Evaluasi Kebijakan	Menyediakan kerangka teoretis yang meliputi tujuan evaluasi, model, dan pendekatan evaluasi
12	(Anggraeni et al., 2013)	Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di BKD Kota Malang)	Proses pengadaan telah sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, namun kurang efektif dalam pencapaian target
13	(Damanik & Marom, 2016)	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Program pelatihan berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun menghadapi kendala modal dan tidak adanya kelanjutan program secara berkala

14	(Nurva & Maharani, 2023)	Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting di Brebes	Kebijakan penanggulangan stunting telah berjalan namun perlu revisi Perbup agar sesuai dengan Perpres terbaru
15	(Sinaga et al., 2021)	Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DKI Jakarta	Implementasi JKN di DKI Jakarta mencapai target UHC namun menghadapi tantangan akses, kepuasan peserta, dan distribusi SDM.
16	(Jubaedah, 2011)	Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan di Daerah	Transparansi mengurangi korupsi dan meningkatkan partisipasi publik.
17	(Rahmah & Rifka, 2018)	Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi	Kebijakan Dana Desa di Dusun Rantau Pandan belum berjalan optimal. Ada masalah pada kompetensi aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi terkait kebijakan. Hasilnya, pemberdayaan yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Masyarakat masih pasif, dan beberapa kegiatan pelatihan belum menarik partisipasi luas.

Pembahasan

Dalam sebuah studi disampaikan bahwa ketimpangan sosial yang muncul akibat kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat menjadi sorotan utama (Rizkwanti & Caspari, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan konteks sosial sering kali mengabaikan dimensi emansipasi dan demokrasi sehingga memperjelas adanya ketidaksetaraan. Pendekatan teori kritis menawarkan cara untuk mengevaluasi dan merevisi kebijakan agar kebijakan tersebut menjadi lebih humanis dan inklusif. Dengan menggunakan teori ini, kerangka kerja yang tersusun dapat mengurai dan memahami aspek-aspek yang rumit, serta memberikan fondasi yang kokoh untuk merancang kebijakan publik yang adil juga berdaya masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan melalui lensa teori kritis menjadi krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, namun juga berpihak pada keadilan sosial dan demokrasi.

Studi lain mengkaji secara kritis peran filsafat positivisme dalam konteks administrasi publik modern. Paradigma positivisme dengan penekanannya pada data empiris dan metode kuantitatif telah diajukan sebagai Solusi untuk mengatasi permasalahan malpraktik dan meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Muslim et al., 2022). Penggunaan data empiris tersebut dapat memberikan kerangka kerja yang objektif untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan bukti yang terukur. Sehingga positivisme memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metode penelitian dan evaluasi kebijakan. Namun perlu diingat bahwa adanya integrasi antara pendekatan positivistik dengan perspektif lain juga perlu dipertimbangkan mengingat realitas sosial bersifat kompleks dan multidimensi.

Pertanyaan kemudian muncul ketika merumuskan sebuah kebijakan tidak diawali dengan sebuah studi pendahuluan. Perannya adalah untuk mencari sebuah dasar yang kuat melalui analisis mendalam dan data empiris sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Konsep ini kemudian dianalisis dalam sebuah studi tentang pentingnya memulai sebuah kebijakan melalui sebuah ide (Swinkels, 2020). Dalam konteks ini, ide akan mempengaruhi kebijakan melalui interaksi antara aktor dan struktur dengan pendekatan berbeda. Maksudnya adalah proses pembentukan kebijakan adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis. Ide-ide tidak secara otomatis menjadi kebijakan, namun melalui interaksi berbagai aktor dan dalam konteks stuktur sosial yang ada. Adanya peran

teori positivisme dan kritis akan memperkaya kerangka analisis mengenai bagaimana ide dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan memberikan panduan metodologis berbasis data empiris dan kritis untuk evaluasi.

Implementasi yang lebih teknis dipaparkan dari penelitian tentang bagaimana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah diterapkan untuk mendukung inklusi sosial masih juga menemui kendala dalam hal pemerataannya (Melati & Asmorowati, 2023). Studi ini memberikan penjelasan bahwa pada kebijakan pemerintah yang menggunakan data kuantitatif dalam penentuan alokasi dana sosial, pemerintah masih mengalami kendala dalam hal akurasi pendataan dan berpotensi merusak tujuan inklusi sosial yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini pendekatan positivisme berperan penting dalam mengumpulkan data yang terukur, sementara teori kritis mendorong evaluasi kebijakan dalam hal keadilan dan distribusi. Sehingga integrasi pendekatan positivisme dan teori kritis sangat penting untuk memastikan kebijakan sosial dapat diimplementasikan secara efektif dan adil.

Konsep penyusunan kebijakan publik di Indonesia semakin menjadi sorotan dari masyarakat yang kritis terhadap efektivitas dan transparansi prosesnya. Dalam sebuah pembahasan konseptual tentang kajian teori perumusan kebijakan publik (Muadi et al., 2016), seiring dengan meningkatnya ekspektasi terhadap perbaikan kualitas kebijakan, masyarakat berharap kebijakan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Tantangan yang muncul adalah bagaimana merumuskan kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis sehingga akan memperkecil timbulnya kritik dan ketidakpuasan. Di sini, teori positivisme berperan dalam memberikan pemahaman sistematis, sedangkan teori kritis diperlukan untuk menilai relevansi kebijakan terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Kompleksitas dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi tantangan utama bagi para pemimpin publik. Kebijakan publik tidak hanya harus memecahkan masalah sosial yang kompleks tetapi juga harus terstruktur secara metodologis agar dapat mencapai tujuan yang jelas. Sebuah studi meneliti perlunya pemahaman yang mendalam terhadap tahapan dalam siklus kebijakan publik (Abdulah et al., 2022). Tanpa pemahaman ini, kebijakan berpotensi tidak efektif akibat gagal menganalisis dan merespons kebutuhan publik dengan tepat. Pendekatan positivisme terlihat dalam analisis siklus yang sistematis, sementara teori kritis dapat dikaitkan dengan kebutuhan akan kritik atas tahapan tersebut untuk kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini mendukung eksplorasi bagaimana teori positivisme membantu menstruktur kebijakan dan teori kritis dapat meningkatkan efektivitas melalui evaluasi yang mendalam.

Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang demokrasi, partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna menjadi semakin penting. Kurangnya peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik menghambat terciptanya kebijakan yang benar-benar *representative* dan *responsive* terhadap kebutuhan masyarakat (Mariana, 2017). Dalam pemahaman demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting karena dapat memperluas ruang pemahaman tentang kebutuhan masyarakat. Teori positivisme menganggap partisipasi formal cukup untuk legitimasi kebijakan, sementara teori kritis menekankan pentingnya partisipasi bermakna untuk membentuk kebijakan yang *representative*.

Lebih lanjut mengenai kebijakan publik yang pembahasannya cukup luas, kita tidak bisa mengalihkan pandangan pada kebijakan yang sifatnya strategis, seperti perumusan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar yang cukup kontroversial dalam implementasinya, hambatan yang cukup signifikan masih ditemui dalam hal perubahan paradigma pendidikan dari pendekatan berbasis materi menjadi basis kompetensi (Siregar, 2021). Dalam perspektif teori kritis, transformasi dari kurikulum lama dapat menjadi hal yang positif dilihat dari sudut pandang kebutuhan kompetensi di masa depan. Namun dalam sudut pandang teori positivisme hal ini dianggap tidak tepat untuk diterapkan. Ketidaktepatan tersebut dikarenakan positivisme dalam konteks pendidikan cenderung berfokus pada aturan dan standar yang telah ditetapkan secara formal dan menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan kriteria yang terukur.

Studi kepada kelompok yang lebih kecil dilakukan pada kelompok masyarakat desa di kabupaten Mappi, Papua (Rahail et al., 2024). Dalam studi tersebut ditemukan bahwa terdapat masalah dalam proses penyusunan kebijakan publik sehingga berdampak pada ketidaksesuaian antara apa yang ditetapkan dalam kebijakan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan positivisme tidak memadai karena kurang memperhatikan konteks lokal, sementara teori kritis mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kebijakan. Sehingga pemerintah harus dapat menyinergikan antara kedua teori dalam perumusan kebijakan publik yang tepat.

Indonesia yang sedang menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan publik, masih memiliki masalah dalam perancangan kebijakan yang dirancang karena masih belum memiliki dampak yang optimal bagi masyarakat. Permasalahan tersebut menyoroti masih adanya pengaruh duplikasi kelembagaan yang merusak efektivitas kebijakan publik dalam lingkup birokrasi yang pada akhirnya menyebabkan pemborosan sumber daya (Kristian, 2023). Temuan tersebut harusnya dapat menjadi dasar bagi penyusun kebijakan untuk mulai melihat arah kebijakan yang tidak bersilangan dengan lembaga-lembaga yang seharusnya tidak perlu dilibatkan. Dalam arah pendekatan positivisme, terlihat dalam upaya pengukuran keberhasilan kebijakan yang akan dihasilkan, namun teori kritis lebih relevan dalam mengevaluasi pengaruh eksternal terhadap implementasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik adalah konsep dasar yang menekankan pentingnya menilai apakah kebijakan mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan. Evaluasi diperlukan karena tidak semua kebijakan berjalan sesuai rencana atau memiliki dampak yang sesuai dengan harapan masyarakat. Masalah utama yang diangkat adalah kurangnya pemahaman dan kerangka teoritis yang solid bagi evaluator kebijakan (Warman et al., 2023). Evaluator perlu memiliki konsep dan model evaluasi yang tepat untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan. Evaluasi formal yang ketat seringkali kurang responsif terhadap perubahan dinamis di lapangan, sehingga model evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan publik yang beragam. Pendekatan positivisme hadir dalam evaluasi formal, sementara pendekatan kritis terlihat dalam evaluasi yang responsif dan sumatif.

Dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Malang, permasalahan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih menemui sejumlah hambatan dikarenakan keterbatasan pengetahuan pengguna dan minimnya integrasi sistem baru dengan sistem yang lama (Anggraeni et al., 2013). Pendekatan positivisme terlihat dalam penggunaan peraturan formal yang diukur dengan standar objektif, sedangkan pendekatan kritis diimplikasikan melalui pengujian efektivitas kebijakan terhadap masyarakat.

Dalam studi lain tentang implementasi kebijakan publik terkait dengan program pengembangan kapasitas masyarakat, ditemukan bahwa permasalahan utama adalah kurang responsifnya sebuah program terhadap kebutuhan spesifik masyarakat (Damanik & Marom, 2016). Dalam sudut pandang teori positivisme kendala ini terjadi karena tidak adanya data empiris yang dapat menggambarkan kondisi spesifik dari indikator yang dibutuhkan untuk mereduksi kompleksitas sosial agar menjadi mudah diukur. Sehingga dibutuhkan *check and balance* dengan implementasi teori kritis sebagai komplementer yang mencegah terjadinya ketidakpuasan masyarakat dan memberikan arah yang sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.

Dalam analisis kebijakan publik yang telah diberlakukan dalam bidang kesehatan (Nurva & Maharani, 2023), potensi ketidaktercapaian target masih cukup sering ditemukan. Meskipun dalam penyusunan dan target prioritas atas implementasi sudah dilakukan dengan menggunakan data dan sistem yang terukur, namun masih ditemukan permasalahan khususnya dalam hubungan lintas sektor. Dalam sudut pandang positivisme pengukuran dalam penyusunan kebijakan dan prioritas dapat dipraktikkan melalui data kuantitatif dan empiris yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan ketepatan dalam pendistribusian kebijakan dalam lingkup masyarakat yang luas. Namun faktanya hasil yang diinginkan masih belum sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga analisis kritis perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya hambatan struktural dalam implementasi kebijakan.

Dalam berbagai analisis dampak yang diukur melalui program evaluasi terhadap kebijakan publik khususnya dalam bidang kesehatan, tantangan terbesar adalah bagaimana sebuah data dapat dipastikan kebenarannya dan sesuai dengan sasaran yang direncanakan (Sinaga et al., 2021). Berbagai macam kebijakan yang menjadi program seringkali tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya statistik yang dapat mendukung sasaran strategisnya. Sehingga dalam sudut pandang positivisme data statistik menjadi dasar dalam memberikan informasi awal siapa subjek dari kebijakan tersebut. Sedangkan teori kritis akan memfokuskan bagaimana data empiris tersebut diimplementasikan secara teknis di lapangan agar menjadi tepat sasaran.

Salah satu fokus dari implementasi positivisme dan kritis juga dapat dilihat pada sebuah studi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan (Jubaedah, 2011). Studi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan transparansi akan memberikan data empiris dan statistik dalam membentuk kerangka objektif untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan evaluasi area yang perlu diperbaiki. Teori kritis akan memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang hambatan struktural dan sosial yang mempengaruhi jalannya kebijakan publik.

Dalam studi lain yang masih menyoroti permasalahan pada transparansi tentang kebijakan publik yang berhubungan dengan keuangan, potensi kegagalan memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan yang efisien (Rahmah & Rifka, 2018). Sekali lagi pendekatan positivisme memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk dapat mengukur keberhasilan sebuah kebijakan melalui data yang melekat pada indikator yang terukur. Namun, teori kritis menyoroti hambatan struktural dan sosial yang menghalangi keberhasilan dalam praktik pengelolaan keuangan yang sehat, seperti dominasi kekuasaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, teori kritis mendorong adanya perubahan kebijakan publik dan memberikan ruang diskusi untuk membuat perbaikan secara berkelanjutan.

Kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan dalam perumusannya, khususnya dalam menciptakan kebijakan yang efektif, inklusif, dan adil. Berdasarkan teori positivisme dan kritis ditemukan bahwa masing-masing pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi. Pendekatan positivisme menitikberatkan pada penggunaan data empiris, metode kuantitatif, dan analisis yang sistematis untuk memastikan kebijakan yang berbasis bukti. Namun pendekatan ini sering kali kurang mempertimbangkan konteks sosial dan aspek keadilan yang lebih luas. Sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang kompleks dan dinamis.

Di sisi lain, pendekatan teori kritis memberikan kerangka untuk mengevaluasi kebijakan secara mendalam, terutama dalam melihat hambatan struktural, dominasi kekuasaan, dan kesenjangan sosial. Pendekatan ini mendorong adanya partisipasi masyarakat yang bermakna serta evaluasi terhadap dampak sosial kebijakan. Namun teori ini membutuhkan integrasi dengan data empiris agar tetap relevan dan terukur dalam pelaksanaannya. Dalam berbagai studi yang dibahas tentang kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan, ditemukan bahwa kolaborasi antara pendekatan positivisme dan kritis dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik, baik dari segi perumusan maupun implementasinya.

PENUTUP

Kebijakan publik yang efektif dan inklusif memerlukan pendekatan yang holistik dimana teori positivisme dan teori kritis memainkan peran penting sebagai dasar analisis. Teori positivisme berkontribusi dengan memberikan kerangka kerja berbasis data empiris dan sistematis, sedangkan teori kritis menawarkan perspektif evaluatif yang mendalam khususnya kesenjangan sosial. Sinergi antara kedua teori ini membuka peluang menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti sekaligus memperhatikan dimensi sosial yang kompleks. Positivisme membantu merumuskan kebijakan dengan landasan yang terukur, sementara teori kritis memastikan bahwa kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat khususnya kelompok rentan yang sering kali terabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Potensi integrasi kedua teori juga dapat

menghasilkan model analisis kebijakan yang lebih adaptif dan dinamis. Dengan demikian, penggunaan teori positivisme dan kritis secara bersamaan dapat menjadi fondasi untuk merancang kebijakan publik yang lebih progresif, berdaya masyarakat, dan relevan dalam menghadapi tantangan sosial di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagailandasan Pengambil Kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
- Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Di Badan Kepegawaiandaerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 119.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>
- Irwan, I., Perdana, F. W., Latuheru, P. M., Khairani, M., & Kartini, S. (2021). Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(12), 2166–2178. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i12.497>
- Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VIII(34), 288–299.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Mariana, D. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *Cosmogov*, 1(2), 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>
- Mayadah, U. (2022). Positivisme Auguste Comte. *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, 2(01), 1–12. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v2i01.26576>
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan Dari Presfektif Kebijakan Publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3453>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muslim, M. H. P., Fitriasia, A., & Ofianto, O. (2022). Filsafat Positivisme Dan Ilmu Pengetahuan Serta Perannya Terhadap Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Mengatasi Mal Administrasi Publik. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 2550–2557.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus Di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(2), 74. <https://doi.org/10.22146/jkki.81342>
- Rahail, A., Mujtahid, I. M., & Sawir, M. (2024). Proses Perumusan Kebijakan Publik Di DPRD Kabupaten Mappi. 7(1), 82–100.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137–154. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1ino.2.1102>
- Rizkwanti, R. A. K. D., & Caspari, A. (2024). Pendekatan Studi Kritis Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Publik. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(1), 44–60. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i1.53728>
- Sholahudin, U. (2020). Membedah Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Sejarah, Asumsi, Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Teori Ilmu Sosial. *Journal Of Urban Sociology*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1246>
- Sinaga, E. S., Ika Rahma Ginting, Kusumaratna, R. K., & Marthias, T. (2021). Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. *Jurnal*

- Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 10(03), 1–9.
- Siregar, G. M. (2021). Teori Kritis Habermas Dan Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 142–151. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.34771>
- Solehudin, D., Natsir, N. F., Haryanti, E., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2021). Epistemologi Ilmu Perspektif Islam (Studi Kritis Atas Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, Dan Konstruktivisme) Deni. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 711–723. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5806799>
- Swinkels, M. (2020). How Ideas Matter In Public Policy: A Review Of Concepts, Mechanisms, And Methods. *International Review Of Public Policy*, 2(3), 281–316. <https://doi.org/10.4000/irpp.1343>
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Vergeles, K. M., Et., Al., 2020, Philosophy Of Science And Technology In Modern World. *Jurnal SOcial PhilosophY*. DOI 10.35433/Philosophical Sciences.2(88).2020.71-79